

ISLAMISME, MODERASI BERAGAMA, DAN SOLO GENEOLOGI PEMAHAMAN MODERASI BERAGAMA KELOMPOK ISLAM DI SOLO

¹Warsito, ²Anisa Abdillah, ³Lulu' Fadhillah, ⁴Anaqoh Abdillah

¹²³⁴ Sekolah Tinggi Islam Al Mukmin Surakarta

warsito@stimsurakarta.ac.id, nievandshone0312@gmail.com, lulufadhillah000@gmail.com⁴
forefront0312@gmail.com

Abstract : *The diversity of beliefs, religions and cultures of the Indonesian nation is an inevitability that often causes friction between residents. Some groups force their beliefs on other groups and even commit violence in the name of religion to achieve this goal. This is what drives the government through the Ministry of Religion to promote Religious Moderation so that Indonesian people do not get caught up in religious fanaticism. This study is a library research that uses books and journals as the main documents with the background of the city of Solo which is known as one of the pockets of the Islamic movement. The study found that the extreme understanding of Islamic groups is based on their belief that Indonesia is not an Islamic country that must be Islamized and based on their understanding of wala' wal bara' which forms an understanding to be hostile to infidels and reject their leadership. Therefore, strengthening literacy and dialogue are the means that must be carried out to change this extreme understanding.*

Keywords: *Moderation, Extremism, Geonology*

PENDAHULUAN

Istilah moderasi beragama muncul menjadi kajian akademik yang menarik di Indonesia sejak pemerintahan melalui Kementerian Agama Republik Indonesia mencetuskan moderasi beragama pada tahun 2019.¹ Kementerian Agama merumuskan gagasan mengenai moderasi beragama secara terstruktur dan menetapkan tahun tersebut sebagai tahun moderasi beragama.² Gagasan moderasi beragama didasari oleh keberagaman suku, budaya dan keyakinan beragama masyarakat Indonesia yang saling berinteraksi dengan membawa perilaku budaya yang berbeda-beda. Perbedaan ini menimbulkan kebanggaan pada kelompok dan meremehkan kelompok lain sehingga menyebabkan persaingan perebutan ruang publik yang sering berakhir dengan konflik

¹ Edi Junaedi, "Inilah Moderasi Beragama Perspektif Kemenag," *Harmoni* 18, no. 2 (2019): 182–86.

² Rena Latifa dan Muhammad Fahri, *Moderasi Beragama: Potret Wawasan, Sikap, dan Intensi Masyarakat* (Depok: Rajawali Press, 2022) hal. 14.

dan berakibat pada kerusakan tatanan masyarakat.³ Contoh kerusuhan yang didasari ras suku dan agama antara lain; konflik antara etnis Tionghoa dan Jawa di Solo,⁴ konflik antara umat beragama di Maluku dan Posko,⁵ konflik antara etnis Dayak dan Madura di Kalimantan.⁶ Untuk itu, program moderasi beragama muncul sebagai respons berbagai konflik tersebut.

Konsep moderasi beragama berdasar pada kata *wasathan* dalam surat Al Baqarah ayat 143 yang berarti tengah. Prinsip *wasathiyah* menjunjung tinggi nilai keadilan dan keseimbangan, bukan ekstrim kekanan maupun kekiri. Prinsip ini memiliki 7 nilai utama, yakni; *tasawuh* (posisi di tengah jalan yang lurus), mengikuti perkembangan zaman, bersikap proporsional, adil, dan bertanggung jawab, *tasamuh* (mengakui dan menghargai perbedaan di segala aspek kehidupan), musyawarah, *islah* (melakukan perbaikan), *qudwah* (inisiatif mulia), *Muwatanah* (pengakuan negara-negara dan penghormatan terhadap kewarganegaraan).⁷ Dari ketujuh nilai di atas, modeasi beragama bertujuan untuk menyelaraskan perbedaan bukan memperuncing perbedaan.⁸ Melalui program ini, Pemerintahan Indonesia mengharapkan adanya kerjasama antar umat beragama untuk menguatkan langkah mereka dalam menangani radikalisme. Moderasi berragama di Indonesia juga bermaksud untuk menanggulangi ajaran ekstrimisme yang diajarkan kelompok Islamis transnasional yang jauh dari nilai-nilai Nusantara.⁹ Gerakan Islamis yang pertama masuk ke Indonesia adalah Ikhwanul Muslimin (IM) dari Mesir. Gerakan ini didirikan oleh Hasan Al Bana pada bulan Maret 1928 di Kota Ismailiyah.¹⁰ Gerakan Islamis yang

³ Agus Akhmadi, "Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia", *Jurnal Diklat Keagamaan*. Vol. 13 No. 2, 2019, hal. 45-46.

⁴ Yahya Ariyanto Putro, Hamdan Tri Atmaja, and Ibnu Sodiq, "Konflik Rasial Antara Etnis Tionghoa Dengan Pribumi Jawa Di Surakarta Tahun 1972-1998," *Journal of Indonesian History* 6, no. 1 (2017), <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jih/article/view/20031>.

⁵ Badrus Sholeh, "Conflict, Jihad, and Religious Identity in Maluku, Eastern Indonesia," *Al Jamiah* 46, no. 1 (2009), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/759/>.

⁶ Heru Cahyono, "The State and Society in Conflict Resolution in Indonesia (Conflict Area of West Kalimantan and Central Kalimantan)," *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities* 1, no. 1 (2008): 151–60, https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=bJcK1vkjdj6gC&oi=fnd&pg=PA151&dq=conflict+in+kalimantan&ots=GEvgU2VIOg&sig=OOQbIe-U-8C_Nlz-jFUUAGEdvYY.

⁷ Sri Wahyuni et al., "SEJARAH MODERASI BERAGAMA DI INDONESIA," *SOCIAL PEDAGOGY: Journal of Social Science Education* 3, no. 2 (2022): 291, <https://doi.org/10.32332/social-pedagogy.v3i2.5877>.

⁸ Sori Monang, Bambang Saputra, and Abdurrohman Harahap, "Moderasi Beragama Di Indonesia: Analisis Terhadap Akidah Ahlu Sunnah Wa Al-Jama'ah," *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 11, no. 01 (2022), <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/ei/article/view/2346>.

⁹ Rohmadi Rohmadi, Jarman Arroisi, and M. Kholid Muslih, "Tinjauan Kompatibilitas Konsep Moderasi Beragama Kementerian Agama Republik Indonesia Dengan Wasathiyatul Islam," *Muaddib: Studi Kependidikan Dan Keislaman* 12, no. 2 (2022): 266–81.

¹⁰ Umma Farida, "Peran Ikhwanul Muslimin D alam Perubahan Sosial P olitik Di Mesir," *Jurnal Penelitian* 8, no. 1 (2014): 45–70.

kedua adalah Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir didirikan oleh Taqiyuddin Nabhani di Kota Yerusalem Palestina pada tahun 1953.¹¹ Gerakan Islamis ketiga yang muncul di Indonesia pada tahun 1980 adalah Salafi. Sementara gerakan Islamis yang memperjuangkan penegakan syariat Islam di Indonesia yang keempat adalah kelompok jihadis. Ideologi jihadis kontemporer di dunia diinisiasi oleh Abul A'la al Maududi.¹²

Kajian tentang moderasi beragama sudah dikaji oleh para sarjana di Indonesia. Sebagian sarjana menghubungkan moderasi beragama dengan gerakan radikalisme dan kerukunan beragama,¹³ moderasi beragama dengan nilai-nilai Pancasila,¹⁴ moderasi beragama dengan budaya dikaji oleh Letitia Susana Beto Letek dan Yosep Belen Keban,¹⁵ dan moderasi beragama dengan pendidikan.¹⁶ Kajian-kajian di atas meninggalkan gap penelitian yaitu moderasi beragama menurut kelompok-kelompok Islamis. Kelompok-kelompok Islamis tentu memiliki pandangan tentang moderasi beragama tetapi bagaimana pandangan mereka dilihat dari sudut pandang teori moderasi yang telah dinyatakan oleh pemerintah Indonesia. Penelitian ini akan mencari geneologi pemikiran mereka tentang moderasi sehingga terungkap filosofi yang mendasari pemahaman tersebut dan membandingkan pemahaman mereka dengan pemahaman kelompok Islam kultural di Indonesia. Fokus penelitian ini membahas tentang bagaimana kelompok islamis dan kelompok tradisional dalam membangun pemahaman mereka tentang moderasi beragama dan mencari akar pemahaman mereka untuk menemukan titik yang membedakan kedua ajaran ini.

METODE

¹¹ Nidia Zuraya, "Syekh Taqiyuddin Al-Nabhani: Sang Pendiri Hizbut Tahrir," March 19, 2012, <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/12/03/19/m13s22-syekh-taqiyuddin-alnabhani-sang-pendiri-hizbut-tahrir>.

¹² As'ad Said Ali, "Al-Qaeda: Tinjauan Sosial-Politik, Ideologi Dan Sepak Terjangnya," *Jakarta: LP3ES*, 2014.

¹³ Priyantoro Widodo and Karnawati Karnawati, "Moderasi Agama Dan Pemahaman Radikalisme Di Indonesia," *PASCA: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen* 15, no. 2 (2019): 9–14. lihat Pribadyo Prakosa, "Moderasi Beragama: Praksis Kerukunan Antar Umat Beragama," *Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity (JIREH)* 4, no. 1 (2022): 45–55.

¹⁴ Hasudungan Sidabutar and Purim Marbun, "Menyemai Moderasi Beragama Dalam Konteks Indonesia Negara Pancasila Yang Plural," *Integritas: Jurnal Teologi* 5, no. 2 (2023): 179–93.

¹⁵ Letitia Susana Beto Letek and Yosep Belen Keban, "Moderasi Beragama Berbasis Budaya Lokal Dalam Pembelajaran Pak Di Smp Negeri I Larantuka," *Jurnal Reinha* 12, no. 2 (2021), <https://jurnal.stpreinha.ac.id/index.php/e-jr/article/download/83/47>.

¹⁶ M. Luqmanul Hakim Habibie et al., "Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam Di Indonesia," *MODERATIO: Jurnal Moderasi Beragama* 1, no. 1 (2021): 121–41.

Ini merupakan penelitian kualitatif dengan design penelitian kajian pustaka yang menggunakan buku, jurnal dan berita online maupun media cetak sebagai sumber data utama. Penelitian dilakukan dengan empat kegiatan utama; pertama, mengumpulkan data berkaitan dengan masalah penelitian, kedua, memadukan temuan-temuan baru, mengalisa kelebihan dan kelemahan data yang ditemukan, keempat, mengkritisi data-data yang dikumpulkan dengan memberikan kesimpulan-kesimpulan atau teori baru.¹⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

Sejarah Kelompok Islamis di Solo

Kota Solo terkenal sebagai pusat budaya Jawa selain Yogyakarta yang kaya akan budaya terkait dengan budi pekerti dan tata krama. Ironisnya, kota ini juga terkenal sebagai kota perlawanan kepada pemerintah yang melahirkan kelompok oposisi kanan dan kiri. Kelompok oposisi yang muncul di kota ini antara lain Sarekat Dagang Islam yang didirikan Haji Samanhoe di pada 1912 yang menentang dominasi perdagangan keturunan Tionghoa dan Belanda.¹⁸ Pada era Orde Baru tahun 1970an, muncul perlawanan terhadap kebijakan Asas Tunggal Pancasila pemerintah Indonesia oleh Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir. Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir beserta anggota NII Surakarta secara lantang menyuarakan penegakkan syariat Islam dan menolak Asas Tunggal Pancasila. Untuk itu, mereka berdua dihukum penjara selama empat tahun dari tahun 1978 sampai 1982. Setelah keluar dari penjara, dua mubalig ini dan anggota kelompok mereka terus aktif mengkritik keras kebijakan Presiden Soeharto sehingga banyak anggota kelompok NII ditangkap sementara mereka berdua bisa kabur ke Malaysia.

Pada masa reformasi, muncul kelompok-kelompok oposisi Islam yang memperjuangkan formalisasi Islam dalam undang-undang di Indonesia. Salah satu bentuk formalisasi Islam adalah tuntutan dikembalikannya Piagam Jakarta berupa tujuh kata di sila pertama Pancasila.¹⁹

¹⁷ Milya Sari and Asmendri Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA," *Natural Science* 6, no. 1 (2020): 41–53, <https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>.

¹⁸ Muhammad Kaffin Mustakif and Mumung Mulyati, "Sarekat Dagang Islam SDI (1905-1912): Between The Savagery of Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) and The Independence of Indonesia," *International Journal of Nusantara Islam* 7, no. 1 (2019): 1–17.

¹⁹ Zudi Setiawan, "Dinamika Pergulatan Politik Dan Pemikiran Formalisasi Syariah Pada Era Reformasi," *Spektrum* 5, no. 2 (2008), <http://dx.doi.org/10.31942/spektrum.v5i2.491>.

Kelompok Islam politik di Solo tidak hanya yang berhubungan dengan ust Abu Bakar Ba'asyir seperti Jamaah Islamiyah (JI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), dan Jamaah Anshorut Tauhid (JAT).²⁰ Laskar Jundullah yang berafiliasi kepada pada Forum Komunikasi Aktivis Masjid (FKAM), Laskar Hizbullah berafiliasi dengan Partai Bulan Bintang (PBB), Laskar Majelis Tafsir Al Quran (MTA), Laskar Front Pembela Islam (FPI) cabang Surakarta, Forum Pemuda Islam Surakarta yang dibentuk orang-orang yang mengaji di pengajian Al-Islam Gumuk, Laskar Jihad yang didirikan Ust Ja'far Umar Tholib. Mereka menyerukan penegakan syariat Islam dan menyatakan permusuhan kepada pelaku kemaksiatan dengan melakukan *sweeping* di tempat-tempat hiburan, perjudian, dan pelacuran.²¹

Dinamika Pemahaman Moderasi Beragama Muslim Solo

Moderasi merupakan serapan dari Bahasa Latin *moderatio* yang berarti pertengahan tidak ekstrem kanan maupun kiri.²² Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), moderasi memiliki arti pengurangan kekerasan dan penghindaran keekstreman.²³ Sedangkan dalam Bahasa Arab kata moderasi memiliki padaan kata *wasath* yang berarti tengah-tengah, adil dan berimbang.²⁴ Moderasi beragama tidak bertujuan untuk memoderatkan agama melainkan mendorong para pemeluk beragama untuk menjalankan ajaran agama tidak berlebihan.²⁵ Moderasi beragama secara garis besar adalah paham keagamaan yang moderat. Kementerian Agama (Kemenag) meluncurkan moderasi beragama sebagai upaya dalam mengatasi konflik antar umat beragama. Kemenag berharap dengan adanya moderasi beragama ini bisa landasan dalam mengelola situasi keagamaan di Indonesia yang beragam dan menciptakan kerukunan dan kedamaian dalam menjalankan kehidupan keagamaan, sehingga tidak terjebak dalam intoleransi, ekstremisme, dan radikalisme.²⁶ Moderasi beragama juga selaras dengan empat pilar komitmen kebangsaan

²⁰ Muzayyin Ahyar, "Membaca Gerakan Islam Radikal Dan Deradikalisasi Gerakan Islam," *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 23, no. 1 (June 15, 2015): 1–26, <https://doi.org/10.21580/ws.23.1.220>.

²¹ Nur Kafid, "Dari Islamisme Ke 'Premanisme': Pergeseran Orientasi Gerakan Kelompok Islam Radikal Di Era Desentralisasi Demokrasi," *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*, 2016, 57–79.

²² Lukman Hakim Saifuddin, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 15.

²³ "Hasil Pencarian - KBBI VI Daring," accessed August 24, 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/moderasi>.

²⁴ Edi Junaedi, "Inilah Moderasi Beragama Perspektif Kemenag," *Harmoni* 18, no. 2 (2019): 182–86, <https://doi.org/10.32488/harmoni.v18i2.414>.

²⁵ Tim Penyusun Kementerian Agama, *Tanya Jawab Moderasi Beragama* (Jakarta Pusat: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 2.

²⁶ Alma Muthia and Moeh Iqbal Sultan, "Website Kemenag. Co. Id Sebagai Strategi Komunikasi Publik Dalam Menyebarluaskan Program Moderasi Beragama," *Jurnal Penelitian Inovatif* 4, no. 2 (2024): 354–360.

yaitu menjunjung tinggi keberagaman, toleransi yang menghargai perbedaan, penolakan penggunaan kekerasan atas nama agama, dan penerimaan serta akomodasi terhadap kekayaan budaya dan tradisi di masyarakat.²⁷

Program moderasi menjadi program nasional karena muncul fanatisme kelompok beragama yang melakukan tindakan intoleren dan melakukan kekerasan dengan mengatasnamakan perintah agama. Pemahaman ini muncul seiring terbukanya arus informasi yang bisa diakses di ruang privat sehingga otoritas keagamaan tidak lagi merujuk pada kyai maupun ustaz tetapi menyebar di dunia maya.²⁸ Salah satu pemikiran yang muncul adalah pemahaman kelompok Islam politik yang menuntut penegakan Syariat Islam di Indonesia. Kelompok ini mencurigai bahwa moderasi adalah program impor dari Barat yang digunakan untuk merusak keyakinan umat Islam. Kelompok ini melihat kebijakan moderasi beragama dalam perspektif politik global, bukan hanya dari perspektif politik lokal Indonesia. Mereka berpendapat moderasi beragama adalah bagian dari strategi politik dari negeri-negeri Barat, khususnya Amerika dan sekutunya. Mereka menggunakan isu moderasi beragama untuk menghalang-halangi umat Islam menjalankan syari'at secara *kaffaah* dan mengubah sudut pandang umat Islam agar mereka mau menerima ide dan pemikiran barat, seperti demokrasi, kebebasan, dan sistem kapitalisme-sekulerisme. Strategi barat dalam moderasi beragama ini dijelaskan dalam buku kajian yang berjudul "*Building Moderate Muslim Network*".²⁹

Kelompok Islamis menjadi tantangan nyata program moderasi beragama karena mereka memiliki pemahaman sebagai berikut: pertama, seruan kembali kepada Al-Qur'an dan As Sunnah yang dipandang sebagai ajaran yang lengkap untuk semua bidang (*Ar-Ruju' ilal Qur'an was sunnah*). Kedua, Mendirikan Negara Islam sebagai tujuan akhir perjuangan. Pandangan ini menetapkan bahwa politik dan agama adalah bagian mutlak dari totalitas Islam. (*Al-Islam dienu wa daulatun*). Ketiga, Tradisi yang benar adalah Islam, semua tradisi yang bukan berdasarkan Islam adalah salah (*Fama ba'dal Haqqi illa dlolal*). Ke-empat, Kebudayaan barat dipandang sebagai musuh Islam, dan orang-orang yang sudah terpengaruh dengan pemikiran Barat

²⁷ Muhammad Fauzinudin Kemenag, "Moderasi Beragama: Pilar Kebangsaan dan Keberagaman," <https://www.kemenag.go.id>, accessed August 24, 2024, <https://kemenag.go.id/kolom/moderasi-beragama-pilar-kebangsaan-dan-keberagaman-MVUb9>.

²⁸ Phil Kamaruddin Amin, "Mengapa Moderasi Beragama?," accessed August 24, 2024, <https://kemenag.go.id/kolom/mengapa-moderasi-beragama-02MbN>.

²⁹ Komunitas Peduli Islam, "Al-Wa'ie Media Politik Dan Dakwah, Edisi Desember 2022," accessed August 24, 2024, <https://osf.io/preprints/hcg89/>.

dianggap berbahaya. Kelima, klaim kebenaran untuk kelompoknya, sehingga sulit mengakomodasikan pemikiran orang lain meskipun dari kalangan umat Islam. Mereka sering memvonis kelompok lain “sesat” bahkan “kafir”.³⁰

Pandangan ini berbeda dengan kelompok agama *mainstream* yakni; Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. NU merupakan salah satu ormas terbesar yang ada di Indonesia yang menegaskan diri mereka dengan Islam Nusantara. Identitas tersebut memperlihatkan bahwa sudah sejak lama NU memegang prinsip moderat dalam pemahaman mereka. Sikap moderat yang dianut oleh NU menegaskan bahwa mereka tidak memberatkan pada satu pihak antara paham kanan dan paham kiri.³¹ Islam Nusantara merupakan dimensi keagamaan dan budaya yang saling berjalani satu sama lain. Gagasan Islam Nusantara juga diartikan sebagai pemahaman dan penerapan Islam dalam aspek fiqh muamalah sebagai dialektika antara syari’at, teks dan ‘urf, budaya dan realitas di nusantara.³² Para pengikut Nahdlatul Ulama didorong untuk memiliki sikap kebangsaan yang mengutamakan keseimbangan antara ukhuwah Islamiyah, ukhuwah *basyariyah*, dan ukhuwah *wathaniyah*. Seorang muslim yang bersikap moderat (*wasath*) adalah orang yang bisa membaca dan memahami realitas yang ada. Tidak ceroboh dalam mempertimbangkan segala sesuatu, termasuk kebaikan dan keburukan.³³ Merujuk pada qur’an surat al-Baqarah ayat 143, bahwa sikap moderat juga merupakan sikap atau pandangan yang tidak berlebihan atau ekstrim.³⁴ Berangkat dari situlah, sikap toleransi menjadi sikap yang harus dimiliki seseorang dalam beragama. Toleransi kepada umat-umat beragama lainnya dengan menghargai pendapat mereka secara terbuka.³⁵ NU memandang moderasi beragama sebagai sikap yang harus diterapkan di tengah masyarakat, terlebih di Indonesia yang merupakan masyarakat majemuk. NU sangat dikenal sebagai organisasi keagamaan yang selalu mengedepankan moderasi dalam beragama. Sikap pertengahan atau moderat yang disandarkan

³⁰ Muhammad Tholhah Hasan, *Prospek Islam Dalam Menghadapi Tantangan Zaman*, ke-lima (Jakarta Selatan: Lantabora Press, 2005), 76.

³¹ Nasikhin Nasikhin and Raharjo Raaharjo, “Moderasi Beragama Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Dalam Konsep Islam Nusantara Dan Islam Berkemajuan,” *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman* 11, no. 1 (2022): 19–34.

³² Suaidi Asy’ari, “Ancaman Nyata dari Dalam: Metamorfosis Identitas Muhammadiyah dan Dilema Demokrasi,” *Jurnal Islam Indonesia*, Vol. 01, No. 01 (Juni 2007): hlm. 18–41.

³³ Amru Almu’tasim, “Berkaca NU Dan Muhammadiyah Dalam Mewujudkan Nilai-Nilai Moderasi Islam Di Indonesia,” *TARBIYA ISLAMIA: Jurnal Pendidikan Dan Keislaman* 8, no. 2 (2019): 199–212.

³⁴ Yazkiyyah Yatasha, Ahmad Zuhri, and Abrar M. Dawud Faza, “Peran Nahdlatul Ulama Dalam Penguatan Nilai-Nilai Moderasi Beragama,” *Studia Sosia Religia* 6, no. 2 (2023): 49–59.

³⁵ Almu’tasim, “Berkaca NU Dan Muhammadiyah Dalam Mewujudkan Nilai-Nilai Moderasi Islam Di Indonesia.”

pada surat al-Baqarah ayat 143 menjadi dasar yang sangat kuat dari lahirnya jargon Islam Nusantara yang dijunjung oleh NU. Menghormati keyakinan orang lain dan saling mengerti adalah bagian terpenting dari toleransi.³⁶

Kelompok *main stream* kedua adalah Muhammadiyah, ormas ini juga menjunjung tinggi moderasi beragama yang terlihat dari jargon mereka yaitu Islam Berkemajuan. Muhammadiyah menyerukan konsep *tajdid* untuk mendefinisikan makna moderasi beragama. Menurut Muhammadiyah *tajdid* maknanya ada dua, yaitu penyucian yang berarti suci dalam akidah, dan yang kedua berarti pembaharuan. Dari kedua makna tersebut terdapat tiga ciri di antaranya beriman dan beribadah, Kedua, memiliki akhlak yang baik. Ketiga, Muhammadiyah memiliki prinsip yang adil dan seimbang dalam muamalah. Gagasan moderasi dalam Muhammadiyah diwujudkan dalam gagasan progresif. Ciri moderatisme Muhammadiyah dibuktikan dalam pemikiran-pemikiran serta visi dan misi untuk mewujudkan moderasi beragama dan membawa Indonesia lebih maju.³⁷ Moderasi beragama pada Muhammadiyah juga diterapkan dalam sikap toleransi beragama. Sebagaimana yang dilakukan oleh pendiri Muhammadiyah sendiri, yaitu K.H. Ahmad Dahlan yang sangat akrab dan berhubungan sangat baik dengan seorang misionaris Kristen. Akan tetapi, beliau tetap menjaga nilai-nilai Islam dan prinsipnya sebagai seorang muslim.³⁸ Gerakan modernis yang dilakukan Muhammadiyah semakin memperhatikan dimensi kultural dalam berdakwah. Dengan demikian Muhammadiyah tetap menjaga prinsip dan misi utamanya.³⁹ Berdasarkan makna *ummatan washatan* dalam surat al-Baqarah ayat 143, Muhammadiyah selalu mencari jalan tengah dalam menyelesaikan persoalan. Segala bentuk perbedaan dengan sesama umat beragama lainnya diselesaikan dengan kompromi yang menjunjung tinggi toleransi dan keadilan. Praktik yang dilakukan oleh tokoh Muhammadiyah merupakan indikasi bahwa Muhammadiyah sejak dahulu ingin menjunjung sikap Islam yang moderat. Sikap moderat ini bertujuan agar para jamaahnya tidak ekstrim dalam meyakini satu kubu saja, akan tetapi memilih jalan tengah di antara dua kubu.⁴⁰

³⁶ yatasha, Zuhri, And Faza, "Peran Nahdlatul Ulama Dalam Penguatan Nila-Nilai Moderasi Beragama."

³⁷ Nasikhin and Raaharjo, "Moderasi Beragama Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Dalam Konsep Islam Nusantara Dan Islam Berkemajuan."

³⁸ Alwi Shihab, *Membendung Arus: Respons Gerakan Muhammadiyah terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia*, Jakarta: Mizan, 1998. hal. 311-312.

³⁹ Almu'tasim, "Berkaca NU Dan Muhammadiyah Dalam Mewujudkan Nilai-Nilai Moderasi Islam Di Indonesia."

⁴⁰ Almu'tasim.

PEMBAHASAN

Pemahaman kelompok Islamis terhadap moderasi beragama sebagai pemahaman yang dipaksakan untuk melemahkan identitas keislaman mereka berakar pada pandangan mereka tentang hukum yang diterapkan negara Indonesia dan pandangan mereka tentang *wala' wal bara'* sebagai komitmen keislaman. Kelompok Islamis berpendapat bahwa ketiadaan Khilafah telah membuat umat Islam lemah, terbelah, dan terpinggirkan dalam persaingan global. Solusi dari masalah tersebut adalah dengan menghidupkan kembali sistem khilafah.⁴¹ Proses legislasinya harus didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah. Kelompok ini sepakat bahwa perdamaian, kerukunan, dan toleransi antar umat beragama di negeri ini harus terus dirawat dan dipertahankan. Namun solusinya bukan dengan mengembangkan moderasi agama atau sikap beragama secara moderat. Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengatur hubungan manusia dengan tuhan, dirinya, dan sesamanya. Dengan demikian, Islam bukan hanya mengatur masalah akidah, ibadah, dan akhlak akan tetapi juga mengatur masalah ekonomi, pemerintahan, sosial, pendidikan, peradilan, sanksi hukum, dan politik luar negeri. Inilah yang dimaksud dengan *Islam kaaffah*.⁴² Hal ini sebagaimana kalam Allah dalam surat Al Baqarah 208 “Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu”.

Islam merupakan keyakinan dan sekaligus tatanan hidup yang memberikan solusi bagi seluruh problematika manusia.⁴³ Allah SWT telah menyebutkan QS. Al-Ma'idah (3): “Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu” penjelasan ayat ini bisa ditelusuri secara historis dalam peradaban Islam selama 13 abad yang memayungi dunia dengan berbagai kegemilangannya. Termasuk juga perlakuan baiknya terhadap warga non-Muslim. Hal ini dijelaskan oleh orientalis Inggris T.W. Arnold dalam tulisannya tentang kebijakan Khilafah Ustmaniyah terhadap warganya yang non-Muslim. Arnold mengatakan bahwa perlakuan

⁴¹ Paelani Setia, M. Taufiq Rahman, and Khaleel Al-Obaidi, “Agama Dan Adopsi Media Baru: Penggunaan Internet Oleh Gerakan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Di Indonesia,” 2022, <https://etheses.uinsgd.ac.id/id/eprint/68281>.

⁴² Muhammad Husain Abdullah. *Studi Dasar-Dasar Pemikiran Islam*. (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002). Hal. 15.

⁴³ Muhammad Husain Abdullah. Op. Cit. hal. 187.

terhadap warga Kristen oleh pemerintahan Khilafah Utsmaniyah selama kurang lebih dua abad setelah penaklukan Yunani telah memberikan contoh toleransi keyakinan yang sebelumnya tidak dikenal di daratan Eropa. Dari pernyataan ini, tuduhan bahwa Islam itu intoleran sebenarnya tidak sekadar ahistoris, namun juga penyesatan politik. Faktanya, secara historis, tanpa moderasi agama pun, Islam memang menjunjung tinggi toleransi dan hal menjadi satu bagian dari sejarah keagungan dan kegemilangan peradaban Islam yang telah memayungi dunia selama 13 abad.⁴⁴

Perluasan dari pemahaman ini adalah sikap kelompok Islamis pada penguasa yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Negara Indonesia tidak bisa dikatakan sebagai negara Islam karena peraturan perundang-undangan yang paling tinggi adalah UUD 1945. Sangat jelas bahwa Indonesia merupakan negara yang tidak menjadikan al-Qur'an sebagai landasan hukum dalam ketatanegaraan.⁴⁵ Tidak tegaknya hukum Islam di Indonesia juga menjadi salah satu ciri bahwa Indonesia adalah bukan Negara Islam. Sebuah Negara dapat disebut negara Islam apabila hukum yang ditegakkan bersumber dari hukum Islam dan kepemimpinan berada di tangan umat Islam.⁴⁶ Kelompok ini berpendapat para penguasa yang dengan kesadaran menerapkan hukum selain hukum Allah adalah kafir.⁴⁷

Kelompok islamis menolak berbagai system yang dibuat oleh manusia baik melalui demokrasi maupun ideologi yang lain bahkan menaati pemimpin seperti ini berarti melakukan syirik ketaatan. Kelompok islamis-idealis menolak praktik demokrasi karena menganggap itu buatan manusia yang tidak sempurna dan cacat dan termasuk sistem syaithon (*thoghut*). Mereka tidak hanya anti terhadap pemilihan umum, tetapi anti *nation state*. *The Islamic state* adalah sebuah keharusan yang tidak bisa ditawar dan merupakan solusi atas semua sistem buatan manusia yang rapuh. Kekuasaan tertinggi adalah milik Tuhan melalui wahyu dan firman-Nya, sehingga demokrasi tidak bisa dibenarkan, karena meletakkan kedaulatan di tangan rakyat

⁴⁴ Islam, "Al-Wa'ie Media Politik Dan Dakwah, Edisi Desember 2022."

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Abdul Hakim Baharudin, "Status of Islamic and Non Islamic States: Views on Contemporary Muslim Scholars: Status Negara Islam Dan Negara Kafir: Pandangan Ulama Kontemporer," *Al-Irsyad: Journal of Islamic and Contemporary Issues* 1, no. 1 (2016): 65–73.

⁴⁷ Abu Bakar Ba'asyir, *Surat Terbuka Untuk Umat Islam* (Solo: JAT Media Center, 2014), 53–55.

sebagai kekuasaan tertinggi.⁴⁸ Kelompok-kelompok ini bercita-cita mengganti undang-undang dasar 45 menjadi undang-undang Islam. Maka kelompok ini sudah keluar dari pilar kebangsaan.

Akar pemahaman kelompok Islamis kedua adalah pemahaman mereka terhadap *wala' dan bara'*. *Wala'* berarti pertolongan, kecintaan, penghormatan dan penghargaan sementara *bara'* berarti jauh, lepas dan permusuhan. Pemahaman ini menuntut seorang muslim untuk mencintai dan melindungi orang muslim dan memusuhi orang yang kafir.⁴⁹ Pemahaman ini berkembang dalam kajian-kajian kelompok Islamis di Kota Solo yang tentunya berseberangan dengan semangat moderasi beragama pemerintah. Kelompok ini berpendapat bahwa hukum memilih pemimpin non muslim di tengah mayoritas umat Islam adalah haram. Larangan memilih pemimpin non-muslim didasari oleh firman Allah dalam Q.S Ali Imron ayat 28 dan 118, Al Maidah ayat 51 dan 57, Al Mumtahanah ayat 1, dan beberapa yang lain dalam al-Quran. Di dalam ayat-ayat tersebut terdapat penekanan yang sama mengenai larangan memilih pemimpin non-muslim untuk menjadi kepala negara atau pemimpin pada mayoritas muslim.⁵⁰

KESIMPULAN

Penelitian menyimpulkan bahwa pemahaman kelompok islamis dipengaruhi pandangan mereka tentang system pemerintahan di Indonesia dan pemahaman mereka tentang *wala' wal bara'* yang membentuk sikap permusuhan kepada orang kafir atau orang yang mereka anggap kafir. Sementara kelompok Islam *main-stream* telah menerima bentuk negara Indonesia dengan berbagai keanekaragamannya. Rekonstruksi pemikiran kelompok islamis membutuhkan kerjasama antar bagian stake holder dari berbagai institusi dengan penekanan pada aspek penambahan literasi dan aspek dialog. Penelitian ini menyumbang penambahan teoritis tentang geneologi pemikiran kelompok islamis dalam bernegara dan bersosial.

⁴⁸ Muhammad Adnan, "Di Bawah Bayang-Bayang Syariat: Islam, Islamisme Dan Demokrasi Di Kota Surakarta," *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 12, no. 1 (2021): 46–67.

⁴⁹ Muhammad bin Said Al Qahthani, *A[-Wala' Wal Bara' Konsep Loyalitas & Permusuhan Dalam Islam*, Terj. Muzaidi (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2018), 104–5.

⁵⁰ J. Hasse, "Respons Publik Muda Islam Tentang Kepemimpinan Non-Muslim Di Indonesia," *Al-Ulum* 18, no. 1 (2018): 61–80.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, Muhammad. “Di Bawah Bayang-Bayang Syariat: Islam, Islamisme Dan Demokrasi Di Kota Surakarta.” *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 12, no. 1 (2021): 46–67.
- Ahyar, Muzayyin. “Membaca Gerakan Islam Radikal Dan Deradikalisasi Gerakan Islam.” *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 23, no. 1 (June 15, 2015): 1–26. <https://doi.org/10.21580/ws.23.1.220>.
- Al Qahthani, Muhammad bin Said. *Al-Wala’ Wal Bara’ Konsep Loyalitas & Permusuhan Dalam Islam*, Terj. Muzaidi. Jakarta Timur: Ummul Qura, 2018.
- Ali, As’ad Said. “Al-Qaeda: Tinjauan Sosial-Politik, Ideologi Dan Sepak Terjangnya.” *Jakarta: LP3ES*, 2014.
- Almu’tasim, Amru. “Berkaca NU Dan Muhammadiyah Dalam Mewujudkan Nilai-Nilai Moderasi Islam Di Indonesia.” *TARBIYA ISLAMIA: Jurnal Pendidikan Dan Keislaman* 8, no. 2 (2019): 199–212.
- Amin, Phil Kamaruddin. “Mengapa Moderasi Beragama?” Accessed August 24, 2024. <https://kemenag.go.id/kolom/mengapa-moderasi-beragama-02MbN>.
- Ba’asyir, Abu Bakar. *Surat Terbuka Untuk Umat Islam*. Solo: JAT Media Center, 2014.
- Baharudin, Abdul Hakim. “Status of Islamic and Non Islamic States: Views on Contemporary Muslim Scholars: Status Negara Islam Dan Negara Kafir: Pandangan Ulama Kontemporari.” *Al-Irsyad: Journal of Islamic and Contemporary Issues* 1, no. 1 (2016): 65–73.
- Cahyono, Heru. “The State and Society in Conflict Resolution in Indonesia (Conflict Area of West Kalimantan and Central Kalimantan).” *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities* 1, no. 1 (2008): 151–60. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=bJcK1vkdj6gC&oi=fnd&pg=PA151&dq=conflict+in+kalimantan&ots=GEvgU2VIOg&sig=OOQbIe-U-8C_Nlz-jFUUAGEDvYY.
- Farida, Umma. “Peran Ikhwanul Muslimin Dalam Perubahan Sosial Politik Di Mesir.” *Jurnal Penelitian* 8, no. 1 (2014): 45–70.
- Habibie, M. Luqmanul Hakim, Muhammad Syakir Al Kautsar, Nor Rochmatul Wachidah, and Anggoro Sugeng. “Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam Di Indonesia.” *MODERATIO: Jurnal Moderasi Beragama* 1, no. 1 (2021): 121–41.
- Hakiki, Kiki Muhamad. “Islam Dan Demokrasi: Pandangan Intelektual Muslim Dan Penerapannya Di Indonesia.” *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya* 1, no. 1 (2016): 1–17.

- “Hasil Pencarian - KBBI VI Daring.” Accessed August 24, 2024. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/moderasi>.
- Hasse, J. “Respons Publik Muda Islam Tentang Kepemimpinan Non-Muslim Di Indonesia.” *Al-Ulum* 18, no. 1 (2018): 61–80.
- Islam, Komunitas Peduli. “Al-Wa’ie Media Politik Dan Dakwah, Edisi Desember 2022.” Accessed August 24, 2024. <https://osf.io/preprints/hcg89/>.
- Junaedi, Edi. “Inilah Moderasi Beragama Perspektif Kemenag.” *Harmoni* 18, no. 2 (2019): 182–86.
- . “Inilah Moderasi Beragama Perspektif Kemenag.” *Harmoni* 18, no. 2 (2019): 182–86. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v18i2.414>.
- Kafid, Nur. “Dari Islamisme Ke ‘Premanisme’: Pergeseran Orientasi Gerakan Kelompok Islam Radikal Di Era Desentralisasi Demokrasi.” *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*, 2016, 57–79.
- Kemenag, Muhammad Fauzinudin. “Moderasi Beragama: Pilar Kebangsaan dan Keberagaman.” <https://www.kemenag.go.id>. Accessed August 24, 2024. <https://kemenag.go.id/kolom/moderasi-beragama-pilar-kebangsaan-dan-keberagaman-MVUb9>.
- Letek, Letitia Susana Beto, and Yosep Belen Keban. “Moderasi Beragama Berbasis Budaya Lokal Dalam Pembelajaran Pak Di Smp Negeri I Larantuka.” *Jurnal Reinha* 12, no. 2 (2021). <https://jurnal.stpreinha.ac.id/index.php/e-jr/article/download/83/47>.
- Monang, Sori, Bambang Saputra, and Abdurrohman Harahap. “Moderasi Beragama Di Indonesia: Analisis Terhadap Akidah Ahlu Sunnah Wa Al-Jama’TM Ah.” *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 11, no. 01 (2022). <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/ei/article/view/2346>.
- Muhammad Tholhah Hasan. *Prospek Islam Dalam Menghadapi Tantangan Zaman*. Ke-Lima. Jakarta Selatan: Lantabora Press, 2005.
- Mustakif, Muhammad Kaffin, and Mumung Mulyati. “Sarekat Dagang Islam SDI (1905-1912): Between The Savagery of Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) and The Independence of Indonesia.” *International Journal of Nusantara Islam* 7, no. 1 (2019): 1–17.
- Muthia, Alma, and Moeh Iqbal Sultan. “Website Kemenag. Co. Id Sebagai Strategi Komunikasi Publik Dalam Menyebarkan Program Moderasi Beragama.” *Jurnal Penelitian Inovatif* 4, no. 2 (2024): 354–60.

- Nasikhin, Nasikhin, and Raharjo Raaharjo. "Moderasi Beragama Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Dalam Konsep Islam Nusantara Dan Islam Berkemajuan." *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman* 11, no. 1 (2022): 19–34.
- Nidia Zuraya. "Syekh Taqiyuddin Al-Nabhani: Sang Pendiri Hizbut Tahrir," March 19, 2012. <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/12/03/19/m13s22-syekh-taqiyuddin-alnabhani-sang-pendiri-hizbut-tahrir>.
- Prakosa, Pribadyo. "Moderasi Beragama: Praksis Kerukunan Antar Umat Beragama." *Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity (JIREH)* 4, no. 1 (2022): 45–55.
- Putro, Yahya Ariyanto, Hamdan Tri Atmaja, and Ibnu Sodiq. "Konflik Rasial Antara Etnis Tionghoa Dengan Pribumi Jawa Di Surakarta Tahun 1972-1998." *Journal of Indonesian History* 6, no. 1 (2017). <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jih/article/view/20031>.
- Rohmadi, Rohmadi, Jarman Arroisi, and M. Kholid Muslih. "Tinjauan Kompatibilitas Konsep Moderasi Beragama Kementerian Agama Republik Indonesia Dengan Wasathiyatul Islam." *Muaddib: Studi Kependidikan Dan Keislaman* 12, no. 2 (2022): 266–81.
- Saifuddin, Lukman Hakim. *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- Sari, Milya, and Asmendri Asmendri. "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA." *Natural Science* 6, no. 1 (2020): 41–53. <https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>.
- Setia, Paelani, M. Taufiq Rahman, and Khaleel Al-Obaidi. "Agama Dan Adopsi Media Baru: Penggunaan Internet Oleh Gerakan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Di Indonesia," 2022. <https://etheses.uinsgd.ac.id/id/eprint/68281>.
- Setiawan, Zudi. "Dinamika Pergulatan Politik Dan Pemikiran Formalisasi Syariah Pada Era Reformasi." *Spektrum* 5, no. 2 (2008). <http://dx.doi.org/10.31942/spektrum.v5i2.491>.
- Sholeh, Badrus. "Conflict, Jihad, and Religious Identity in Maluku, Eastern Indonesia." *Al Jamiah* 46, no. 1 (2009). <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/759/>.
- Sidabutar, Hasudungan, and Purim Marbun. "Menyemai Moderasi Beragama Dalam Konteks Indonesia Negara Pancasila Yang Plural." *Integritas: Jurnal Teologi* 5, no. 2 (2023): 179–93.
- Tim Penyusun Kementerian Agama. *Tanya Jawab Moderasi Beragama*. Jakarta Pusat: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- Wahyuni, Sri, Riska Dwi Lestari, Nahrul Mukholidah, Ratna Sari, and Arif Rochman. "SEJARAH MODERASI BERAGAMA DI INDONESIA." *SOCIAL PEDAGOGY: Journal of Social Science Education* 3, no. 2 (2022): 289–301. <https://doi.org/10.32332/social-pedagogy.v3i2.5877>.

Widodo, Priyantorono, and Karnawati Karnawati. “Moderasi Agama Dan Pemahaman Radikalisme Di Indonesia.” *PASCA: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen* 15, no. 2 (2019): 9–14.

Yatasha, Yazkiyyah, Ahmad Zuhri, and Abrar M. Dawud Faza. “PERAN NAHDLATUL ULAMA DALAM PENGUATAN NILA-NILAI MODERASI BERAGAMA.” *Studia Sosia Religia* 6, no. 2 (2023): 49–59.